

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. (UU RI No 40 tahun 2004)

Manfaat yang dapat diperoleh dari BPJS yakni pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis. Pembayaran tarif premi setiap bulannya secara mandiri sesuai dengan kelas yang dipilih terdiri dari tiga kelas, yaitu: Kelas 1 sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan; Kelas 2 sebesar Rp. 100.000,-/ orang/bulan; dan Kelas 3 sebesar Rp. 35.000,-/orang/ bulan, Iuran BPJS kelas 3 seharusnya sebesar Rp.42.000, karena mulai tanggal 1 Januari 2021 pemerintah akan memberikan bantuan iuran sebesar Rp. 7.000 sehingga iuran dapat dibayarkan sebesar Rp. 35.000. (Perpres No 64 Tahun, 2020)

Menurut PPID Kabupaten Blitar, pada tahun 2018 pencapaian UHC tercatat masih 54,9%, dengan kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebanyak 428.498 dan Non PBI sebanyak 155.522. Sehingga total yang baru terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu 638.194 atau 51.9% dari jumlah penduduk kabupaten blitar 1.229.002 jiwa. Di tahun 2019 jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan belum mencapai 95% dari 22 kecamatan yang ada di kabupaten blitar mayoritas belum mencapai 50% keikutsertaan BPJS Kesehatan. (Adiniyah, 2019)

Menurut bhirawaonline, pada tahun 2020 jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) di kabupaten blitar yang bersumber dari APBD kini jumlahnya telah mencapai 59.920 jiwa, ada juga anggaran yang bersumber dari APBN bagi penerima KIS. Berdasarkan data terakhir yang ada, jumlahnya mencapai 410.519 jiwa.(Supriyatno, 2020) Menurut rri.co.id, pada tahun 2021 dari jumlah total penduduk sebanyak 1.249.190 jiwa, 59,62% atau 744.805 jiwa penduduk yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Peserta yang terdaftar baik secara mandiri, penerima bantuan iuran daerah (PBID) ataupun pegawai. (Alivia, 2021)

Kepesertaan JKN dibagi menjadi 3 yaitu PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU/Mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Namun, besarnya data kepesertaan dan data jaminan pelayanan kesehatan memerlukan perhatian dan perlakuan yang khusus untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). (Bpjskesehatan.go.id, 2021)

Menurut informasi yang didapat masih banyak masyarakat yang belum mengikuti BPJS Kesehatan di Dusun Tegalrejo, informasi tersebut didapat saat melakukan pendataan SDGs di Dusun Tegalrejo di setiap RT. Karena waktu itu di aplikasi SDGs banyak sekali pertanyaan salah satunya adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Dan ternyata waktu ditanya tentang kepesertaan tersebut belum mempunyai BPJS Kesehatan karena tidak minat mengikuti BPJS Kesehatan. Dan pernah dibuatkan kuesioner tentang keikutsertaan BPJS Kesehatan dan ternyata yang mengisi kuesioner tersebut belum memiliki atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Adapun jumlah masyarakat di dusun tegalrejo 3168 masyarakat dan yang mengikuti sebagai peserta BPJS Kesehatan sejumlah 512 masyarakat, yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejumlah 2656 masyarakat. Dari beberapa survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden terkait ketidakikutsertaan mereka dalam program tersebut dikarenakan malas mendaftar dan takut nanti pelayanan yang diberikan kurang baik.(Sutanta, 2016)

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian tentang gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan di Dusun Tegalrejo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan di Dusun Tegalrejo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan di Dusun Tegalrejo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengidentifikasi gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Tingkat Pengetahuan
- b) Untuk mengidentifikasi gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Tingkat Pendidikan
- c) Untuk mengidentifikasi gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Pendapatan
- d) Untuk mengidentifikasi gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Persepsi Masyarakat

1.4 MANFAAT

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan literatur dan membantu dalam proses pengembangan keilmuan serta meningkatkan wawasan tentang gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, serta dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan.
- b. Manfaat bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, untuk menambah referensi pustaka dalam program studi D3 Asuransi Kesehatan tentang gambaran karakteristik masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
- c. Manfaat bagi Peneliti, sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah wawasan, kemampuan dan pengetahuan yang telah didapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes.